

Proyek Tol Trans-Sumatera Harus Transparan

JAKARTA – Pemerintah diminta transparan dalam proses pembangunan jalan tol Trans-Sumatera sepanjang 2.700 kilometer (km). Proses penunjukan langsung kepada PT Hutama Karya di antaranya dinilai tak adil karena tanpa melalui proses tender, padahal pembiayaan pembangunan jalan tol itu sepenuhnya menggunakan APBN.

“Pemerintah seharusnya memberi kesempatan semua pihak, baik badan usaha milik negara maupun swasta lewat proses tender,” kata praktisi dan pengamat hukum publik Feizal Syahmenan se usai diskusi terbatas bertajuk *Menolak Penunjukan Langsung Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatera* yang diadakan Institute For Public Trust di Jakarta, Senin (25/3).

Menurut dia, pembangunan jalan tol melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta perlu diterapkan dalam membangun jalan tol Trans-Sumatera, seperti yang dilakukan untuk ruas tol Medan-Kualanamu. Tol Medan-Kualanamu saat ini sudah menyelesaikan tahap prakualifikasi tender. Dengan skema ini, pemerintah bisa mendapatkan manfaat yang maksimal karena diperoleh melalui skema tender yang transparan, kompetitif, dan terbuka.

“Belum semua ruas tol Trans-Sumatera ditender. Selama ini hanya ruas Medan-Binjai dan Palembang-In-

dralaya yang pernah ditenderkan dan tidak ada yang berminat. Itu juga karena tidak ada skema dukungan pemerintah,” tambah Feizal.

Lebih lanjut dia mengusulkan agar pemerintah menghentikan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 dan pembuatan peraturan presiden (perpres) penunjukan langsung Hutama Karya sebagai kontraktor pembangunan tol Trans-Sumatera.

“Penunjukan langsung itu bertentangan dengan hukum dan asas keadilan,” tandas dia.

Di tempat yang sama, Ketua Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Nasional (Unas) Jakarta Budi Kusuma menambahkan, masalah pembangunan jalan tol Trans-Sumatera berada di proses pengadaan lahan, bukan pendanaan. Apalagi, tiap pencairan dana yang berasal dari APBN harus mendapatkan persetujuan DPR dan penggunaannya melalui proses tender, bukan penunjukan langsung.

“Jika penunjukan langsung terus dilakukan, patut dicurigai ada apa di balik ini. Apalagi sekarang sudah menjelang pemilu,” kata dia.

Penugasan

Di sisi lain, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak sebelumnya menegaskan, pemerintah tidak menunjuk langsung Hutama Karya untuk mengerjakan tol Trans-Sumatera, me-

lainkan memberikan penugasan kepada perusahaan negara tersebut. Penugasan ini diberikan karena tak ada investor yang berminat membangun tol Trans-Sumatera, meski sudah dilakukan tender pada 2005-2008.

Menurut dia, penugasan yang diberikan kepada BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah akan berimplikasi pada percepatan pembangunan jalan tol. Apalagi selama ini rata-rata pembangunan jalan tol di Indonesia sekitar 30 kilometer per tahun.

“Sedangkan negara lain, seperti negara tetangga ada ratusan, bahkan ribuan kilometer yang dibangun dalam setahun. Kita harus inovatif dalam pengerjaan proyek ini,” tandas dia.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Ari Widiatoro mengatakan, penugasan itu mengacu pada UU No 38/2004 ayat 50 pasal 5 yang menyatakan, dalam keadaan tertentu pemerintah bisa menunjuk BUMN guna mendukung pembangunan infrastruktur. Dia juga menegaskan, dengan adanya penugasan bukan berarti mempersempit peluang badan usaha lainnya untuk berpartisipasi.

“Bukan berarti Hutama Karya sebagai investor yang ditunjuk pemerintah lalu kami juga mendapat hak untuk membangun. Semuanya sama, melalui tender juga dan siapa saja boleh ikut,” kata dia. (ean)